



# Autodebit Bikin Pedagang Nyaman

Pembayaran retribusi PKL secara autodebit yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta antara lain untuk menghindari kebocoran dan pungli.

**DENI ARYANTO**

**M**ENCARI nafkah dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL), terutama PKL liar yang berjualan di tempat sembarang, tidaklah mudah. 'Main kucing-kucingan' dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja kerap terjadi saat penertiban berlangsung.

Namun, tidak demikian halnya dengan para PKL resmi di sejumlah lokasi, termasuk di lokasi binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta di lima wilayah, antara lain di Jalan Gunung Sahari No 7A dan Jalan Irian, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka bisa berjualan dengan tenang dan nyaman.

Kini para pedagang bahkan lebih dimudahkan dengan diresmikannya layanan pembayaran retribusi melalui pemotongan otomatis (autodebit) dari rekening Bank DKI milik mereka. Tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yakni Rp3.000 per hari. Jumlah tersebut akan diakumulasi dan dipotong Bank DKI dari saldo rekening para PKL per tanggal 15 setiap bulan.

Penerapan sistem pemba-

ayaran retribusi PKL melalui autodebit yang resmi diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 29 Januari lalu itu mendapat respons positif dari para pedagang. Mereka menilai cara pembayaran seperti itu menjauhkan dari penarikan retribusi liar.

"Dengan begini, tidak ada pungutan lainnya. Cukup kita menabung, lalu bank yang otomatis memotong untuk retribusi. Ini lebih teratur dan lebih mudah," kata Rianto, salah seorang PKL ikan hias yang menempati kios di sepanjang jalan inspeksi rel kereta api, tepatnya Jalan Gunung Sahari No 7A, pekan lalu. Di lokasi itu terdapat 83 kios PKL resmi.

Rianto yang telah berjualan ikan lebih dari 25 tahun mengatakan, sebelum ada sistem penarikan retribusi melalui bank, ia kerap dimintai pungutan lain oleh beberapa pihak, mulai organisasi kemasyarakatan yang mengaku petugas keamanan hingga yang mengaku petugas kecamatan. Pungutan yang diminta bervariasi, yaitu antara Rp3.000 per hari, Rp3.000 per minggu, dan Rp15 ribu per minggu.

## Kas daerah

Penarikan retribusi secara autodebit, ujarnya, juga membuatnya yakin bahwa retribusi yang ia keluarkan masuk ke kas daerah. "Kalau dulu saya tidak tahu ke mana uang itu mengalir, untuk siapa, dan untuk apa. Kami sebagai orang kecil membayar saja yang diminta. Kalau begini, jelas masuk ke pemerintah," kata Rianto.

Hal senada diutarakan sejumlah pedagang yang menempati kios-kios pada lokasi binaan di Jalan Irian. "Lebih enak seperti itu, setor langsung. Jadi, kami juga makin dapat kejelasan," ujar Hendra, salah satu pedagang.

Menurutnya, sosialisasi tentang pembayaran retribusi melalui autodebit, beberapa waktu lalu, sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi binaan yang menampung 13 pedagang tersebut.

Februari ini para pedagang diperkirakan sudah bisa membayar retribusi dengan cara itu sebab seluruh pedagang telah membuka rekening tabungan di Bank DKI yang akan men-debit retribusi.

"Pada 20 Januari lalu kami semua sudah membuka tabungan di Bank DKI. Mungkin bulan ini sudah mulai langsung dipotong," ucap Hendra lagi.

Ia mengatakan pembayaran retribusi secara autodebit tidak hanya memudahkan para PKL, tetapi juga menguatkan legalitas tempat berjualan sehingga mereka bisa berjualan dengan lebih nyaman. Hendra juga berharap pembayaran dengan cara tersebut memberikan keuntungan lain kepada para pedagang, di antaranya kemudahan mengajukan pinjaman modal kepada bank.

Lokasi PKL binaan di Jalan Irian berdiri sejak 1990. Kawasan tersebut merupakan tempat menampung dan membina para PKL yang sebelumnya berjualan di sekitar Jalan KH Agus Salim. (Put/J-2)

deni\_aryanto  
@mediaindonesia.com